

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BERKAT CAKRA INDONESIA

Leonardhy Budiono Sadono dan Widjojo Suprpto
Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra
Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya
E-mail: leonardhy123@gmail.com, joe.suprpto@gmail.com

Abstrak—Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang telah diterapkan dan belum diterapkan oleh perusahaan. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif untuk menggali informasi secara mendalam dengan menggunakan metode wawancara. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan *purposive sampling*. Sedangkan untuk menguji keabsahan data yaitu menggunakan triangulasi sumber. Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Berkat Cakra Indonesia telah melaksanakan 5 prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, Independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Tetapi penerapannya belum menyeluruh.

Kata Kunci— *Good Corporate Governance*, tata kelola perusahaan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran

I. PENDAHULUAN

Pada era Globalisasi ini, penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Hal itu dikarenakan penerapan prinsip GCG mampu Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan, Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan, Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional. Penerapan GCG dalam perusahaan yang ada di negara berkembang lebih berdampak positif dibandingkan di negara maju. Perusahaan yang menerapkan GCG di lingkungan yang hukumnya buruk akan lebih memperoleh manfaat (Klapper & Love, 2002).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu badan negara atau lembaga internal pemerintah yang memegang peranan penting dalam pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan. Menurut BPKP, definisi *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi *soft definition* yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu: "Komitmen, Aturan Main, Serta Praktik

Penyelenggaraan Bisnis Secara Sehat dan Beretika"(Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, 2011).

Berdasarkan data BPKP, 65 perusahaan BUMN dan BUMD yang telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Tetapi penerapan GCG belum menjadi budaya oleh perusahaan perusahaan di Indonesia, Melainkan hanyalah sebuah bentuk penerapan formalitas pemenuhan regulasi dan performa. Hal itu menyebabkan masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan GCG (Business Review, 2014, "GCG belum menjadi budaya").

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), *Good Corporate Governance* adalah sebuah bentuk upaya memotivasi pihak manajemen untuk meningkatkan keberhasilan (*effectiveness*) dan sekaligus juga mengendalikan perilaku manajemen agar tetap mengindahkan kepentingan *stakeholders* (KNKG,2006). Penerapan *Good Corporate Governance* ini memiliki tujuan, yaitu: Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas-asas *Good Corporate Governance*, Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan, mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya, meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan(KNKG, 2006).

Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan *Good Corporate Governance* ini sendiri menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) adalah Kemudahan dalam meningkatkan modal, Mampu menurunkan *Cost of Capital* perusahaan, Peningkatan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi, memberi dampak baik pada harga saham(*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, fcgi.or.id).

Penerapan *Good Corporate Governance* mampu menghasilkan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Semakin tingginya tingkat implementasi GCG, Maka semakin tinggi pula nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan tingginya harga saham perusahaan. Perusahaan besar akan memiliki masalah keagenan yang lebih besar dan menyebabkan susahnyamemonitor masalah yang ada. Oleh karena itu, diperlukannya penerapan *Corporate Governance* yang baik. Sedangkan pada perusahaan kecil penerapan *Corporate Governance* yang baik mampu mempunyai

kesempatan bertumbuh yang tinggi (Retno M. & Priantinah, 2012).

Namun, pada penerapannya, Proses penerapan *Good Corporate Governance* tidak berdampak secara langsung kepada kinerja perusahaan dalam jangka pendek. Manfaat penerapan *Good Corporate Governance* bersifat *longterm* atau jangka panjang. Penerapan *Good Corporate Governance* ini seharusnya menjadi kultur bagi perusahaan, tetapi penerapannya sekarang sebagian besar hanya karena dorongan regulasi. Kurangnya keseriusan perusahaan – perusahaan di Indonesia dalam penerapan *Good Corporate Governance* ini disebabkan oleh buruknya sistem birokrasi dan penegakan hukum di Indonesia (Purwani, 2010).

Tingginya pertumbuhan industri makanan dan minuman sekitar 4 hingga 5 persen pada basis *year on year* mampu memacu meningkatnya peminat bisnis dalam menjalankan bisnisnya di industri makanan dan minuman. Diketahui dari sumber Kementerian perindustrian (Kemenperin, 2015) bahwa pada tahun 2015, pertumbuhan industri di Indonesia ditopang oleh investasi di sektor makanan. Dengan tingginya pertumbuhan industri makanan dan minuman ini menunjukkan pasar makanan dan minuman di Indonesia yang tumbuh positif cenderung menarik bagi investor asing. Industri makanan dan minuman nasional terbukti menjadi salah satu industri dengan tingkat pertumbuhan cukup tinggi di Indonesia. Meningkatkan minat akan bisnis makanan minuman di Indonesia ini bukan tanpa resiko. Semakin tingginya pertumbuhan, maka semakin tinggi kemungkinan pula adanya pelanggaran pelanggaran terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

Penerapan *Good Corporate Governance* di dalam industri makanan dan minuman sangatlah penting, karena dalam industri makanan dan minuman sangatlah dibutuhkan kejelasan, kualitas, bahan-bahan yang terkandung di dalam produk. Pentingnya hal tersebut karena makanan dan minuman langsung masuk ke dalam tubuh manusia dan sangatlah sensitif apabila produk yang masuk dalam tubuh kita kurang *qualified*. Seperti kasus produksi makanan kadaluarsa yang marak terjadi, seperti di Jombang. Adanya Produksi makanan ringan wafer yang diproduksi *home industry* oleh Handoko (45). Pada kasus ini ditemukannya 1 ton lebih bahan baku snack wafer yang telah direject atau kadaluarsa. Proses pengolahan kembali dengan dihancurkan oleh mesin molen terlebih dahulu, kemudian di packing kembali. Dari hasil penyelidikan ini, ditemukan bahwa sebenarnya makanan kadaluarsa ini biasa digunakan untuk pakan ternak. Selain itu, produk ini juga tidak memiliki ijin edar dari BPOM dan dinas kesehatan (Surabayaneews, 2015).

PT. Berkat Cakra Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan makanan dan minuman kesehatan. Perusahaan ini beralamat di Jalan Klampis jaya 45B. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2014. Proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Berkat Cakra Indonesia ini dengan cara membeli bahan jadi dari perusahaan supplier yang kemudian bahan jadi tersebut dipacking oleh perusahaan khusus packaging yang menjadi mitra dari PT. Berkat Cakra Indonesia ini dengan brand Zegen. Seluruh kepemilikan saham perusahaan tersebut dimiliki oleh seorang pemilik saja yang bernama Heru Cakra yang juga merupakan *founder* dari PT. Berkat Cakra Indonesia ini.

Pada PT. Berkat Cakra Indonesia, terdapat masalah penerapan *Good Corporate Governance* yang terjadi. Seperti, pihak direktur dan manajer yang bersikap kurang terbuka terhadap setiap staff. Sehingga bisa dilihat bahwa adanya *gap* yang terasa di dalam perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan belum menerapkan prinsip transparansi yang seharusnya terbuka terhadap setiap anggotanya. Kurangnya penerapan transparansi ini mampu menciptakan masalah tersendiri untuk perusahaan seperti *miss* komunikasi, pemberian informasi yang kurang jelas kepada setiap staff.

Dari penjabaran di atas, penulis ingin meneliti prinsip-prinsip apa saja yang telah diterapkan secara tidak sadar dan prinsip mana yang belum diterapkan oleh perusahaan, serta apa kendala yang dihadapi sehingga perusahaan tidak dapat menerapkan prinsip terkait. Melalui penelitian ini diharapkan dapat meyakinkan perusahaan mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG, serta menjadi pedoman bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan kualitas perusahaan serta membantu perusahaan menghadapi tingkat persaingan yang tinggi di industri makanan dan minuman.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Berkat Cakra Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* mana yang telah diterapkan dan yang belum diterapkan oleh PT. Berkat Cakra Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan ukur dalam penerapan asas – asas GCG baik yang telah diterapkan secara tidak sadar ataupun yang belum diterapkan, serta mampu menjadi acuan bagi pihak perusahaan untuk meningkatkan kinerja, kualitas, dan *image* perusahaan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mengetahui sebab seperti bagaimana dan mengapa suatu masalah terjadi dalam penelitian. Penelitian kualitatif sendiri mencakup teknik interpretasi yang mendalami suatu permasalahan, sehingga peneliti dapat mendeskripsikan, mengartikan data, sehingga mencapai suatu kesimpulan. (Cooper, 2008, p. 162). Penelitian deskriptif hanya menganalisis sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. (Azwar 2013, p. 6).

Penelitian kualitatif deskriptif, menurut Leksono (2013, p. 181) adalah sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang dapat menjadi objek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian yang tidak dapat diukur dengan statistik dan hasil dari penelitian akan disajikan secara naratif, serta agar dapat dari penelitian dapat ditarik kesimpulan secara deskriptif sebagai hasil akhir.

Subjek penelitian merupakan sumber utama data penelitian, yang memiliki variable-variabel yang diteliti (Azwar, 2013, p.

34-35) Dalam penelitian ini PT Berkat Cakra Indonesia menjadi subjek penelitian yang akan diteliti.

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013, p. 38).

Objek penelitian tertuju kepada konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang memiliki beberapa prinsip – prinsip, yaitu *Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness* (TARIF).

Teknik penerapan narasumber menurut Burhan Bungin (2009), Hal terpenting dalam prosedur sampling penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* pada penelitian kali ini. Teknik tersebut adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yakni partisipan memiliki keunikan maupun karakteristik pada pengalaman, perilaku, persepsi, baik secara konseptual maupun teoritis yang dapat dikembangkan selama proses wawancara (Cooper, 2008, p. 169). Teknik *purposive sampling* cocok untuk digunakan karena penulis ingin mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang memahami pembahasan penelitian, sehingga penulis dapat menyajikan data yang kredibel. Narasumber yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik sekaligus direktur perusahaan, manager bagian operasional, manager bagian pemasaran,. Pemilik dipilih karena dianggap paling mengerti perusahaan, mulai dari sejarah pendirian hingga pengembangan perusahaan, serta pengambilan-pengambilan keputusan perusahaan sehingga pemilik memiliki pengetahuan secara umum mengenai perusahaan. Penulis juga memilih manager bagian operasional dan pemasaran, untuk meninjau lebih dalam mengenai implementasi kebijakan, sistem, fungsi, dan struktur perusahaan berkaitan dengan divisi mereka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dari perusahaan.

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Esterberg dalam Sugiyono (2013:72) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur menurut Esterberg dalam buku Sugiyono(2013 p. 412) sudah termasuk dalam *category in-depth interview*. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yakni pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, karena melalui wawancara, proses penyaluran informasi dari narasumber dapat lebih sistematis, terencana, dan sesuai dengan pembahasan penelitian sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat.

Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut

1. Pemilahan Data

Data yang diperoleh akan berjumlah cukup banyak,

maka penulis perlu memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dicari, serta tidak menggunakan data yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah dipilah akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian data

Setelah memilah data, maka penyajian data dilakukan dengan menguraikan hubungan antar data. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan, bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung. Selain itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan menjadi deskripsi atau gambaran objek penelitian berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan proses triangulasi. Menurut Sugiyono (2013, p. 464), triangulasi adalah validasi silang dalam penelitian kualitatif berdasarkan pengumpulan data-data dari berbagai sumber. Diartikan juga sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini, uji keabsahan dilakukan melalui triangulasi karena dalam pendekatan kualitatif, keabsahan data tidak dapat diukur dengan alat uji statistik. Kebenaran dari data dan informasi yang diperoleh dianggap valid apabila kebenaran tersebut relevan dan sesuai antar masing-masing sumber. Informasi yang diperoleh dari tiap narasumber akan dicocokkan satu sama lain dan apabila informasi tersebut memiliki kecocokan unsur maka informasi tersebut dianggap valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT. Berkat Cakra Indonesia didirikan pada tahun 2014 dan berlokasi di Jalan Klampis Jaya 45B, Ruko Klampis Millenia, Surabaya. PT. Berkat Cakra Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman kesehatan. Bergerak sebagai distributor makanan dan minuman kesehatan dengan merk Zegen. Produk yang dimiliki oleh PT. Berkat Cakra Indonesia ini ada 2 produk utama, yaitu Zsmooth dan Zettagen. Produk PT. Berkat Cakra Indonesia ini diperoleh dari pihak supplier yang menyuplai barang jadi namun belum ada merknya, dan kemudian dibranding sendiri oleh PT. Berkat Cakra Indonesia ini dengan nama Zegen.

PT. Berkat Cakra Indonesia ini memiliki Staff sebanyak 15 orang sebagai pihak manajemen dalam perusahaan. PT. Berkat Cakra Indonesia memiliki rencana dalam pengembangan perusahaan dengan menambah jumlah produk yang dijual. Seperti Zegen Coffee dan Propolis. PT. Berkat Cakra Indonesia ini juga berencana melakukan ekspansi perusahaan dengan menjual produk produknya di luar pulau Jawa agar produk Zegen ini dikenal di seluruh Indonesia.

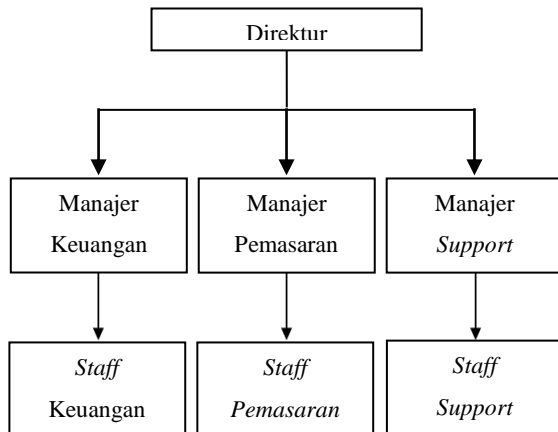
Visi PT. Berkas Cakra Indonesia adalah menjadi Perusahaan terbaik bagi pelaku bisnis makanan kesehatan dan membangun masyarakat Indonesia

Misi PT. Berkas Cakra Indonesia adalah mendistribusikan produk berkualitas untuk kesehatan masyarakat dan membuka peluang dunia usaha yang mudah, transparan dan beretika

1. Struktur Perusahaan

PT Berkas Cakra Indonesia memiliki struktur perusahaan sebagai berikut:

Gambar 1 Struktur PT. Berkas Cakra Indonesia



Job description masing-masing adalah sebagai berikut:

Direktur

1. Mengawasi dan mengontrol kegiatan di perusahaan.
2. Memimpin perusahaan.
3. Merumuskan strategi.

Manajer Keuangan

1. Mengatur cash flow keuangan perusahaan
2. Mengatur penggajian staff

Manajer Pemasaran

1. Ekspansi perusahaan
2. Memasarkan produk-produk perusahaan
3. Membuat program, target, dan strategi pemasaran

Manajer Support System

1. Melakukan *training support* terhadap staff

Bentuk perusahaan PT. Berkas Cakra Indonesia adalah badan hukum dengan struktur kepemilikan berupa perseroan terbatas (PT) dengan adanya pemisahan antara *asset* perusahaan dan *asset* pribadi pemilik perusahaan. PT. Berkas Cakra Indonesia ini merupakan PT tertutup Perusahaan ini hanya kepemilikan individu oleh Heru Cakra. PT Berkas Cakra Indonesia juga telah berkembang di beberapa kota di Indonesia, seperti Surabaya, Makassar, Medan, Palu, Kendari, Jogjakarta.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah arahan yang berupa sebuah aturan, arahan dalam bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kualitas, dan image perusahaan. Penerapan GCG ini dilakukan untuk keberlangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang karena dengan adanya GCG ini, maka akan adanya keseimbangan antara *stakeholder* perusahaan tersebut. Manfaat yang didapatkan dari penerapan GCG perusahaan dapat meningkatkan efektifitas

perusahaan, peningkatan kinerja bisnis, kinerja ekonomi perusahaan. Dalam implementasinya, dibutuhkan partisipasi dan komitmen dari seluruh bagian perusahaan. Jika tidak diterapkan secara menyeluruh, maka pelaksanaan *Good Corporate Governance* akan menjadi tidak efektif.

Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu membawa perusahaan ke kondisi yang terstruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku dan profesional. PT Berkas Cakra Indonesia saat ini telah mengimplementasikan secara bertahap lima prinsip-prinsip GCG pada operasional dan pelaksanaan perusahaan, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.

1. Transparansi (*Transparency*)

Dalam pembahasan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan. Perusahaan harus dengan sadar memberikan keterbukaan terhadap setiap pemangku kepentingan. Indikator-indikator yang dijadikan acuan dalam transparansi adalah penyampaian informasi dan kebijakan perusahaan (KNKG, 2006).

Dalam indikator tentang informasi menjelaskan bahwa informasi yang disediakan harus material, relevan, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh setiap pemangku kepentingan. Informasi yang diungkapkan meliputi hal yang berkaitan dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Sedangkan dalam indikator kebijakan perusahaan dilihat dari keterbukaan perusahaan terhadap para pemangku kepentingan baik eksternal ataupun internal terkait penyampaian informasi dari hasil pengambilan keputusan

Melalui penelitian yang dilakukan terhadap PT Berkas Cakra Indonesia, saat ini telah menerapkan prinsip transparansi akan tetapi penerapan prinsip transparansi di dalam perusahaan belum menyeluruh. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa masih adanya indikator penyampaian informasi tentang laporan keuangan. Dalam indikator penyampaian informasi, penyampaian informasi dalam perusahaan sudah terbuka. Penyampaian visi dan misi kepada pihak internal dan eksternal telah tersampaikan dengan baik, dilihat bahwa setiap stakeholder mampu mengakses visi dan misi dari website yang telah disediakan yaitu www.myzege.com. Dalam website tersebut, terdapat informasi seputar perusahaan, produk, kode etik perusahaan. Informasi lain seperti struktur perusahaan, peraturan perusahaan, kebijakan perusahaan, serta sistem reward dan punishment sudah tersampaikan baik kepada seluruh anggota perusahaan. Tetapi, mengenai masalah informasi laporan keuangan, ditemukan bahwa keterbukaan laporan keuangan hanya sampai pada level manager.

Transparansi perusahaan juga dilihat melalui indikator kebijakan perusahaan. Dalam PT. Berkas Cakra Indonesia, pembuatan kebijakan dilakukan oleh direktur dan manajer dalam sebuah meeting. Hal ini diakui oleh Heru, Hamzah, dan Nora bahwa setiap pembuatan kebijakan perusahaan melalui proses meeting direktur dan manajer. Penyampaian hasil

kebijakan disampaikan kepada semua staff perusahaan apabila bersifat umum, tetapi untuk kebijakan tertentu misal kebijakan tentang support system perusahaan yang ditujukan kepada bagian support system, maka bagian support system saja yang akan memperoleh informasinya, dengan kata lain, hanya divisi yang bersangkutan saja. Tidak semua kebijakan harus disampaikan ke seluruh bagian, apalagi apabila terdapat kebijakan tersebut tidak relevan dengan divisi mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak adanya kebingungan atau miss komunikasi yang terjadi akibat penerimaan informasi kebijakan yang tidak relevan dengan divisi yang berkaitan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, sistem, serta struktur perusahaan. Akuntabilitas dalam perusahaan mampu membantu proses pengelolaan perusahaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Hal ini dapat menghasilkan kinerja perusahaan secara transparan dan wajar (KNKG, 2006).

Prinsip akuntabilitas pada PT Berkat Cakra Indonesia ditinjau melalui indikator kejelasan struktur perusahaan, pembagian tugas dan tanggung jawab, tata tertib perusahaan, pengawasan pelaksanaan di dalam perusahaan, serta sistem reward dan punishment dalam perusahaan. Dalam indikator kejelasan struktur perusahaan bisa dilihat dari bentuk strukturnya apakah sesuai dengan bentuk struktur perseroan terbatas (PT) seharusnya. Pembagian tugas dan tanggung jawab menjelaskan ada atau tidaknya tumpang tindih dalam pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing masing organ perusahaan. Tata tertib perusahaan dilihat dari bagaimana perusahaan memiliki SOP yang jelas atau tidak.

Pada indikator pengawasan pelaksanaan dapat dilihat dari bagaimana perusahaan melakukan kontrol terhadap setiap organ perusahaan. Dalam sistem reward dan punishment perusahaan dilihat dari kinerja masing masing organ perusahaan. Akuntabilitas sangat diperlukan supaya pengelolaan dalam perusahaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya akuntabilitas dalam perusahaan, mampu memicu terjadinya kerancuan pengambilan keputusan karena jabatan yang tumpang tindih maupun pembagian tanggung jawab yang tidak jelas.

Indikator pertama tentang kejelasan struktur perusahaan. Struktur perusahaan pada PT. Berkat Cakra Indonesia sudah dicantumkan pada gambar 1 menjelaskan bahwa pada setiap anggota perusahaan telah memiliki jabatan dan tugas yang jelas. Namun, untuk struktur perusahaan yang terbentuk masih belum sesuai dengan kriteria perseroan yang tepat sesuai dengan indikator GCG yang seharusnya memiliki unsur Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan direksi, Dewan Komisaris (KNKG, 2006). Dalam struktur perusahaan, pemilik perusahaan menjabat sebagai direktur perusahaan yang membawahi manajer-manajer dari divisi seperti penjualan, support system dan keuangan. Hal ini diakui oleh Hamzah, bahwa perusahaan belum memerlukan adanya kedudukan dewan komisaris dan dewan direksi karena perusahaan belum terlalu besar, sehingga dalam pengambilan keputusan serta pengawasan ditangani langsung oleh direktur perusahaan. Dalam kegiatan operasionalnya, para kepala divisi

yang ada akan memberikan laporan secara berkala kepada direktur.

Indikator kedua, akuntabilitas juga diukur dari kejelasan pembagian tugas serta tanggung jawab dalam perusahaan. Pada PT Berkat Cakra Indonesia, pembagian tugas dan tanggung jawab antar karyawan sudah jelas, sehingga tidak ada pembagian tugas yang rangkap. Hamzah, Heru dan Nora mengakui bahwa pembagian tugas untuk staff dibuat oleh manajer masing-masing divisi. Hal ini berarti, bahwa sudah ada kejelasan tanggung jawab dan tugas masing-masing anggota perusahaan.

Indikator ketiga dalam prinsip akuntabilitas adalah tata tertib perusahaan. Tata tertib di PT Berkat Cakra Indonesia, dari hasil wawancara diketahui untuk pihak internal, bahwa setiap divisi memiliki masing – masing SOP perusahaan menyangkut pertanggung jawaban dari kinerja masing masing divisi.

Indikator keempat merupakan pengawasan pada perusahaan. Bentuk pengawasan pada perusahaan dilakukan oleh manajer yang mengawasi kinerja staff dan kemudian memberikan laporan kepada direktur. Evaluasi kinerja tiap divisi pun rutin dibahas pada meeting yang diadakan secara berkala. Namun, dalam penggunaan audit, perusahaan mengakui hanya menggunakan internal audit, tetapi belum menggunakan audit eksternal dan komite audit. Perusahaan juga belum menggunakan jasa komisaris independen.

Indikator lainnya yaitu berupa sistem reward dan punishment. Menurut hasil penelitian, perusahaan akan memberikan reward pada staff sesuai dengan hasil kinerja yang dievaluasi setiap 3 bulan. Reward yang diterima bisa berupa meningkatnya gaji atau naiknya jenjang karir. Perusahaan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawan. THR biasa diberikan pada saat idul fitri. Berkaitan dengan THR, perusahaan mengaku selama ini tidak pernah mendokumentasikan pemberian THR, tetapi langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Untuk sistem punishment, PT Berkat Cakra Indonesia juga tidak langsung memecat karyawan yang melakukan kesalahan. Mereka memilih untuk memberikan teguran apabila kesalahan yang dilakukan masih bisa ditolerir. Namun, apabila kesalahan tersebut tidak bisa ditolerir, maka perusahaan akan melakukan PHK terhadap karyawan tersebut.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Penerapan prinsip responsibilitas pada perusahaan dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan penerapan prinsip tersebut mampu terciptanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Dalam penerapan prinsip responsibility ini terdapat dua indikator, yaitu indikator kepatuhan peraturan dan indikator pelaksanaan tanggung jawab perusahaan. Pada indikator ketaatan peraturan, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Dalam indikator tanggung jawab perusahaan, pihak perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan

terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai (KNKG, 2006).

Dalam indikator ketaatan peraturan, perusahaan telah mengetahui dan melaksanakan undang-undang perlindungan konsumen, sehingga diharapkan konsumen dapat menggunakan produk-produk yang diproduksi secara aman dan meningkatkan citra perusahaan. Dalam pelaksanaannya, menurut pengakuan Heru, Hamzah dan Nora, produk yang dijual memiliki BPOM sehingga menjamin keamanan produknya. Perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi BPOM pada produknya, maka bisa dikatakan bahwa produk yang dijual pasti memenuhi standar yang berlaku. Perusahaan juga telah menaati peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti memiliki izin dagang yang legal, mendaftarkan produk-produk yang dijual kepada BPOM, serta membayar pajak kepada negara. Tidak hanya itu, perusahaan juga memastikan menggunakan bahan baku yang aman sesuai dengan perundangan yang berlaku seperti tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya. Untuk perusahaan sendiri, PT. Berkat Cakra Indonesia juga telah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan sebagai perusahaan seperti SIUP, TDP, dan NPWP perusahaan.

Bentuk penerapan responsibility perusahaan dengan indikator tanggung jawab kepada karyawan, yaitu untuk menunjang kesejahteraan karyawan mereka memberikan asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada setiap karyawan. Para karyawan juga menerima upah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Heru Cakra, para karyawan juga diberi kelonggaran-kelonggaran agar dapat merasa lebih nyaman saat bekerja. Kelonggaran bisa berupa berbagai macam hal, salah satunya seperti adanya jam istirahat dan penentuan jam masuk kerja dalam range jam 8 sampai jam 10, namun dengan konsekuensi semakin siang masuk kerjanya, maka semakin lama juga jam pulang kerjanya.

PT Berkat Cakra Indonesia juga memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, yaitu dengan menjamin produk yang dipasarkannya berkualitas tinggi, sehingga masyarakat dapat mendapatkan manfaat langsung dari produk yang diproduksi oleh PT Berkat Cakra Indonesia. Produk-produk yang diproduksi sering di tes di laboratorium untuk diuji mengenai keamanannya. Selama bulan puasa, perusahaan mengadakan acara buka bersama kepada warga-warga sekitar lokasi kantor PT. Berkat Cakra Indonesia

4. Independensi (Independency)

Independensi dalam prinsip GCG adalah suatu kondisi di mana masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dalam proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan, perusahaan tidak dipengaruhi oleh kepentingan, pengaruh atau tekanan dari pihak-pihak tertentu, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan, dapat dilakukan secara obyektif dan netral. Dalam melaksanakan tugasnya, masing – masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

Dalam indikator pengambilan keputusan, sepenuhnya keputusan diambil oleh direktur perusahaan. Namun, dalam

proses pengambilan keputusannya dilakukan rapat direktur dengan manajer untuk membahas kebijakan mana yang akan diambil.

Dalam indikator pelaksanaan tugasnya, setiap anggota perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dan tidak saling mendominasi antar divisi. Hak ini diakui oleh Heru, Hamzah dan Nora bahwa setiap keputusan yang diambil dan dijalankan telah dikomunikasikan dengan baik dengan tujuan agar tidak mengutamakan salah satu divisi, sehingga mampu berjalan dengan baik secara teratur dan seimbang. Tindakan itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara divisi agar tidak adanya dominasi.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Prinsip fairness menggambarkan kesamaan dan kewajaran. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Indikator yang digunakan kesetaraan kesempatan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan pendapat, perlakuan perusahaan kepada pemangku kepentingan sesuai manfaat dan kontribusi kepada perusahaan, pemberian kesempatan yang sama pada karyawan secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik (KNKG, 2006).

Dalam pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk menyampaikan saran, perusahaan menyediakan sarana telepon dan email sebagai tempat penyampaian pendapat kepada perusahaan. Setiap stakeholder mampu memberikan masukan dan pendapat kepada pihak perusahaan dengan kesempatan yang sama tanpa perlakuan khusus.

Untuk perlakuan perusahaan kepada stakeholdernya, perusahaan bersifat adil dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Hal ini diakui oleh Heru dan Hamzah bahwa perusahaan tidak pernah memberikan perlakuan khusus kepada setiap stakeholdernya

Pada indikator pemberian kesempatan yang sama kepada setiap karyawannya, perusahaan bersifat adil kepada setiap karyawannya untuk memperoleh promosi jabatan. Hal ini diakui oleh Hamzah bahwa setiap anggota perusahaan mampu memperoleh promosi tanpa memandang suku, agama, ras gender, kondisi fisik dan referensi.

Pembahasan penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Berkat Cakra Indonesia

1. Penerapan TARIF

Dari hasil penerapan GCG ini diharapkan mampu memperoleh manfaat kepada perusahaan dengan meningkatnya efektifitas perusahaan, peningkatan kinerja bisnis, dan kinerja ekonomi perusahaan. Meningkatkannya efektifitas perusahaan bisa dilihat dari dengan menerapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat menghilangkan hambatan – hambatan dalam buruknya tradisi dalam perusahaan seperti, sentralisasi dan non demokrasi. Penerapan *Good Corporate Governance* juga mampu memberikan peningkatan pada kinerja bisnis suatu perusahaan dengan mampu memberikan pemahaman yang baik dan mempertahankan keberadaan perusahaan untuk jangka panjang, serta mampu memberikan efek positif komunikasi antara pihak perusahaan dengan stakeholder. Peningkatan

kinerja ekonomi perusahaan berupa meningkatnya harga saham perusahaan dan mampu menjadi perhatian pemerintah dan perbandingan untuk calon investor.

Penerapan prinsip – prinsip TARIF (Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran) dalam PT. Berkat Cakra Indonesia sebagai berikut

1. Transparansi

Penerapan prinsip transparansi pada PT. Berkat Cakra Indonesia telah dijalankan, tetapi belum menyeluruh. Penyampaian visi dan misi perusahaan telah tersampaikan dengan baik. Informasi seperti struktur perusahaan, peraturan perusahaan, kebijakan perusahaan, serta sistem rewarding dan punishment sudah tersampaikan dengan baik kepada anggota perusahaan. Dalam penyampaian kebijakan juga telah dijalankan dengan baik. Perusahaan juga telah menyediakan informasi untuk diakses oleh publik dengan menggunakan website www.myzege.com. Dari hasil yang didapatkan, PT. Berkat Cakra Indonesia telah menerapkan prinsip transparansi tetapi masih ada indikator yang belum dapat dilaksanakan, yakni pada indikator penyampaian informasi laporan keuangan, keterbukaan perusahaan terhadap laporan keuangan hanya sampai tingkat manajer. Dari hasil wawancara, hal ini dilakukan karena dirasa tidak penting oleh direktur. Untuk informasi – informasi mengenai perusahaan, pihak perusahaan telah menyediakan website sebagai sarana untuk pihak eksternal perusahaan untuk mengaksesnya. Sedangkan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan perusahaan, telah ditetapkan pihak – pihak yang berhak membuat kebijakan yaitu para manajer. Dan kemudian kebijakan tersebut akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan porsi masing-masing, seperti publik, staff, pemegang saham.

2. Akuntabilitas

Struktur perusahaan pada PT. Berkat Cakra Indonesia telah tersampaikan dengan jelas beserta posisi dan tugasnya. Namun, belum ada jabatan dewan komisaris, dewan direksi perusahaan. Pembagian tugas dan tanggung jawab perusahaan telah dibentuk dengan baik. SOP perusahaan juga telah dilakukan dengan baik. Bentuk pengawasan perusahaan sudah dijalankan dengan setiap manajer memberikan laporan kepada direktur secara berkala. Evaluasi kinerja dilakukan secara meeting berkala, tetapi belum memiliki audit eksternal dan komite audit. Perusahaan telah menerapkan sistem reward dan punishment berdasarkan kinerja anggota perusahaan. Dari hasil yang didapatkan, perusahaan PT Berkat Cakra Indonesia telah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas tetapi ada indikator dalam prinsip akuntabilitas yang belum dapat dilaksanakan. Pada struktur perusahaan, Seluruh organ perusahaan telah memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing, Namun perusahaan belum memiliki audit eksternal, komite audit, dan komisaris independen. Hanya memiliki internal audit. Pengawasan dalam sistem operasional perusahaan dengan dilakukan dengan mengadakan meeting bulanan. Untuk tata tertib dalam perusahaan, perusahaan memiliki SOP pada masing-masing divisi. Dalam sistem reward dan punishment perusahaan telah menerapkannya sesuai dengan hasil kinerja masing-

masing staff. Pada sistem *reward* dan *punishment* perusahaan, yang bertanggung jawab pada kinerja staff adalah para manajer, sedangkan untuk penilaian kinerja para manajer yang bertanggung jawab adalah direktur. Untuk penilaian kinerja setiap divisi berbeda tergantung dari setiap manajer memberikan penilaian. Kekurangan yang ditemukan dalam implementasi prinsip akuntabilitas di mana struktur perusahaan yang belum sesuai dengan struktur perseroan yang seharusnya, yaitu tidak ada rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.

3. Responsibilitas

Dari hasil analisa, perusahaan telah menerapkan prinsip responsibilitas. Ditinjau dari segi tanggung jawab perusahaan, perusahaan telah memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat dengan menjamin setiap produknya menggunakan bahan-bahan alami yang aman bagi tubuh manusia. Perusahaan juga memberikan kontribusi dengan komitmen kualitas produk yang aman dan bermanfaat bagi konsumen, serta setiap produk yang dipasarkannya telah terdaftar dalam BPOM. Dari sisi tanggung jawab kepada karyawan, perusahaan telah mendaftarkan karyawan kepada BPJS dan memberikan upah sesuai dengan UMR.

4. Independensi

Dari hasil penelitian, PT Berkat Cakra Indonesia dalam menerapkan prinsip independensi, bisa dilihat bahwa tidak adanya dominasi antar divisi dimana tidak adanya salah satu divisi yang mengatur divisi lain sehingga divisi lain memperoleh tekanan. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direktur juga tidak memperoleh tekanan dari pihak manapun.

5. Kesetaraan dan kewajaran

Dari hasil penelitian ini, perusahaan telah menerapkan prinsip fairness dengan menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan kesempatan yang diberikan kepada stakeholder. Pemberian perlakuan yang sama kepada *stakeholder* juga dilakukan oleh perusahaan tanpa ada perlakuan khusus kepada pihak-pihak tertentu. Kesempatan promosi jabatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dilihat dari kinerja bukan dengan melihat suku, agama, ras, gender, kondisi fisik dan referensi.

Kesulitan penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT. Berkat Cakra Indonesia adalah pada prinsip transparansi, bisa dilihat pada bagaimana perusahaan menentukan batasan – batasan keterbukaan kepada pihak eksternal dan internal, seperti urusan keuangan perusahaan hanya terbuka pada pihak internal sampai level manager. Pada prinsip akuntabilitas, perusahaan belum memiliki struktur yang selayaknya perseroan terbatas sesuai peraturan, dan adanya rangkap jabatan oleh pemilik yang seharusnya sebagai komisaris juga menjabat sebagai direktur. Sehingga untuk tugas dan tanggung jawab juga tercampur pada direktur dan komisaris. Perusahaan juga belum menggunakan jasa audit eksternal, komite audit dan komisaris independen dalam perusahaan dikarenakan pihak perusahaan mengakui belum membutuhkannya.

Manfaat penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan mampu memperoleh manfaat kepada perusahaan dengan meningkatnya efektifitas perusahaan, peningkatan kinerja bisnis, dan kinerja ekonomi perusahaan. Meningkatnya efektifitas perusahaan bisa dilihat dari dengan menerapkannya prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dapat menghilangkan hambatan – hambatan dalam buruknya tradisi dalam perusahaan seperti sentralisasi dan non demokrasi (Wu, 2006), sehingga dengan diterapkannya GCG pada PT. Berkat Cakra Indonesia mampu menghilangkan tradisi buruk seperti, gap antar divisi dan sentralisasi. Penerapan GCG juga mampu memberikan peningkatan kinerja bisnis suatu perusahaan dengan mampu memberikan peningkatan pada kinerja bisnis suatu perusahaan dengan mampu memberikan pemahaman yang baik dan mempertahankan keberadaan perusahaan untuk jangka panjang, serta mampu memberikan efek positif komunikasi antar pihak perusahaan dan stakeholder (Picou & Rubach, 2006). Penerapan prinsip – prinsip GCG oleh PT. Berkat Cakra Indonesia akan berdampak positif untuk jangka panjang perusahaan (Purwani, 2012). Karena perusahaan ini baru berdiri dua tahun, maka penerapan prinsip GCG ini mampu meningkatkan keberlangsungan perusahaan untuk jangka panjang. Peningkatan kinerja ekonomi perusahaan bisa berupa dengan meningkatnya harga saham perusahaan dan nilai perusahaan (Reny & Denies, 2012). Penerapan transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan dalam memproduksi laporan keuangan mampu memberikan peningkatan kinerja bisnis, efektifitas, dan peningkatan kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya komunikasi terhadap stakeholdereksternal (James, 2010)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap PT. Berkat Cakra Indonesia, kesimpulan yang diperoleh mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bahwa perusahaan telah menerapkan sebagian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara tidak sadar namun masih ada kekurangannya. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* PT. Berkat Cakra Indonesia adalah sebagai berikut:

Transparansi

PT. Berkat Cakra Indonesia telah menerapkan prinsip transparansi, tetapi penerapannya belum menyeluruh. Hanya sebagian yang diterapkan seperti pembuatan kebijakan, dilakukan oleh tiga manajer dan direktur dalam meeting yang kemudian hasil kebijakannya di informasikan kepada setiap karyawan perusahaan. Perusahaan juga menyediakan website sebagai alat untuk menunjukkan bukti transparansi pihak eksternal perusahaan mampu mengakses informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Tetapi, untuk laporan keuangan perusahaan ini masih belum transparansi kepada seluruh staffnya, hanya pada sampai tingkat manager saja.

Akuntabilitas

PT. Berkat Cakra Indonesia telah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas tetapi belum semua di jalankan dengan baik. Seluruh organ perusahaan telah memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing, Namun perusahaan belum memiliki audit eksternal, komite audit,

dan komisarisi independen. Hanya memiliki internal audit. Pengawasan dalam sistem operasional perusahaan dengan dilakukan dengan mengadakan *meeting* bulanan. Pengawasan kepada pihak eksternal dilakukan secara berkala mingguan. Untuk tata tertib dalam perusahaan, perusahaan memiliki SOP pada masing-masing divisi. Dalam sistem *reward* dan *punishment* perusahaan telah menerapkannya sesuai dengan hasil kinerja masing – masing *staff*. Kekurangan yang ditemukan dalam implementasi prinsip akuntabilitas di mana struktur perusahaan yang belum sesuai dengan struktur perseroan yang seharusnya, yaitu tidak ada rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Rangkap jabatan oleh pemilik dan direktur.

Responsibilitas

PT. Berkat Cakra Indonesia telah menerapkan prinsip tanggung jawab perusahaan, perusahaan telah memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat dengan menjamin setiap produknya menggunakan bahan – bahan alami yang aman bagi tubuh manusia. Dari sisi tanggung jawab kepada karyawan, perusahaan telah mendaftarkan karyawan kepada BPJS dan memberikan upah sesuai dengan UMR. Perusahaan juga memberikan kontribusi dengan komitmen kualitas produk yang aman dan bermanfaat bagi konsumen, serta setiap produk yang dipasarkannya telah terdaftar dalam BPOM.

Independensi

PT Berkat Cakra Indonesia dalam menerapkan prinsip independensi, pihak perusahaan sudah independen dengan bukti bahwa setiap anggota perusahaan menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak ada dominasi pihak tertentu. Pengambilan keputusan didalam perusahaan dapat dilakukan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak luar.

Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Dalam penerapan prinsip Fairness ini, Perusahaan berbuat adil baik kepada setiap *stakeholder* dan karyawannya. Pemberian kesempatan yang sama, perlakuan yang sama juga.

Jadi, Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dari 5 prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, *fairness* yang telah diterapkan oleh PT. Berkat Cakra Indonesia adalah pada prinsip *responsibility*, *independency* dan *fairness*.

Saran

Dari hasil penelitian ini, Saran yang diberikan kepada PT. Berkat Cakra Indonesia yaitu:

1. Penyampaian laporan keuangan perusahaan terkait dengan prinsip transparansi, seharusnya terbuka kepada pihak internal perusahaan sampai semua staff. Dan untuk pihak eksternal perusahaan apabila belum sebagai perusahaan go public mungkin bukan masalah, tetapi untuk pihak internal perusahaan sebaiknya mengetahui informasi tentang keuangan perusahaan. Dengan tujuan apabila perusahaan terbuka secara keuangan kepada pihak internal, dan ada divisi yang menyadari bahwa

pengeluaran perusahaan terlalu besar di divisinya untuk hal yang dirasa kurang perlu, maka anggota divisi tersebut akan dengan sadar mampu mengurangi pengeluaran – pengeluaran perusahaan yang akan berdampak meningkatnya efektifitas dan atau efisiensi perusahaan.

2. Dalam hal akuntabilitas tentang struktur perusahaan, sebaiknya perusahaan mulai mempertimbangkan bentuk struktur perusahaan dan mengikuti panduan GCG mengenai bentuk struktur perusahaan yang sesuai dengan peraturan, dimana sebuah PT harus memiliki RUPS, Dewan Direksi, serta Dewan komisaris. Sehingga untuk proses jangka panjangnya perusahaan tidak akan ada rangkap jabatan atau kesusahan dalam mengelola perusahaan. Dan untuk penggunaan audit perusahaan, sebaiknya perusahaan menggunakan jasa audit eksternal, karena dalam audit eksternal lebih bersifat objektif, dan audit eksternal juga lebih memfokuskan kepada dampak dari hal – hal yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan seperti evaluasi trend dan identifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Armand Picou & Michael J. Rubach (2006), Does Good Corporate Governance Matter to Institutional Investors? Evidence from the Enactment of Corporate Governance Guidelines. Retrieved April 25, 2016, from ProQuest
- Azwar, S. (2013), Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2016), Good Corporate Governance. Retrieved April 25, 2016, from <http://www.bpkp.go.id>
- Burhan Bungin (2009), Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset
- Business Review (2014), GCG Belum jadi Budaya, Retrieved April 25, 2016, from <http://br-online.co/gcg-belum-jadi-budaya/>
- C.-F. Wu (2006), The Study of the Relations among Ethical Considerations, Family Management and Organizational Performance in Corporate Governance. Retrieved April 25, 2016, from ProQuest
- Carla CJM Millar & Tarek I Eldomiaty & Chong Ju Choi & Brian Hilton (2005), Corporate Governance and Institutional Transparency in Emerging Markets. Retrieved April 25, 2016, from ProQuest
- Cooper (2008). Business Research Methods. Singapore: McGraw Hill.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil (2009), Seluk Beluk Perseroan Terbatas. : Jakarta: PT Rineka Cipta
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (2016), retrieved April 25, 2016 from <http://www.fcgi.or.id/>
- Felix Horber (2005), Corporate Governance – Implementation, Challenge and Trends. Legal & Compliance Risk Assesment
- James C. Gaa (2010), Corporate Governance and the Responsibility of the Board of Directors for Strategic Financial Reporting. Retrieved April 25, 2016, from ProQuest
- Kementrian Perindustrian Republik Indonesia (2015), retrieved April 25, 2016 from <http://www.kemenperin.go.id/>
- Klapper, L. F. & Love, I. (2002). Corporate Governance, Investor protection and performance in emerging markets, from Journal of Corporate Finance 10 (2004) 703-728
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), Pedoman GCG Indonesia. Komite Umum Nasional Kebijakan Governance. Jakarta. Retrieved April 25, 2016, from <http://knkg-indonesia.com/home/component/weblinks/43-pedoman-knkg/14-pedoman-gcg-indonesia-2006.html>
- Leksono, S. (2013). Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marie dela Rama (2012), Corporate Governance and Corruption : Ethical Dilemmas of Asian Business Groups. Retrieved April 18, 2016, From ProQuest
- Reny Dyah Retno M. & Denies Priantinah (2012), Pengaruh Good Corporate Governance dan pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan, Retrieved April 18, 2016, From Jurnal Nominal. Vol I. No I.
- Sugiyono (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Surabayanews (2015), Polisi Amankan Peredaran Makanan Ringan Kadaluarsa, retrieved April 25, 2016 from <http://surabayanews.co.id/2015/02/10/13341/polisi-amankan-peredaran-makanan-ringan-kadaluarsa.html>
- Tri Purwani (2010), Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan, Retrieved April 18, 2016, From Majalah Ilmiah Informatika Volume 1 Nomor 2
- Wahyu Kurniawan, 2012, Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan, Jakarta :PT Pustaka Utama Grafiti,